

Judul : IKN Jumlah ASN perlu ditambah
Tanggal : Rabu, 26 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

IKN Jadi Ibu Kota Politik

Jumlah ASN Perlu Ditambah

SUMBER: IG PRIBADI



Muhammad Rifqinizamy

KOMISI II DPR meminta Pemerintah segera menentukan skema pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi perebutan sumber daya maupun kewenangan administratif antara daerah dan IKN.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, potensi konflik bakal ada jika sektor-sektor ekonomi strategis, termasuk minyak dan kepelabuhanan. Dan, ada banyak sekali potensi pendapatan IKN. Seluruh sumur minyak yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sekarang masuk ke deliniasi IKN.

Dalam mazhab penguasaan laut 12 mil, potensi sumber daya ekonomi sektor kepelabuhanan IKN juga yang paling ramai di Kalimantan Timur. "Karena itu, kami mohon dikoordinasikan dengan baik, agar tidak ada semacam perebutan, antara Kaltim sama IKN, Kukar dengan IKN, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan IKN," tegas Rifqi saat rapat bersama Kementerian PANRB, Otorita IKN, BKN, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).

Selanjutnya, dia menyoroti belum adanya kejelasan terkait jumlah ASN pusat yang akan berkantor di IKN. Saat ini, jumlah ASN di tingkat pusat ada 1,3 juta, sedangkan di daerah 4,2 juta. "Pertanyaannya, jika IKN dijadikan Ibu Kota Politik pada 2028, dari 1,3 juta ASN pusat, berapa yang akan beraktivitas dan berkantor di IKN?" ucap anggota Fraksi Partai NasDem itu.

Menurutnya, jika pemindahan ASN tidak dirancang dengan detail, maka infrastruktur yang sudah dibangun berisiko terbengkalai. Karena itu, kepastian terkait skema penempatan ASN, termasuk rencana hunian, status jabatan yang bisa menempati rusun, hingga keterlibatan perbankan untuk pembiayaan jadi hal yang sangat krusial.

"Negara kan juga harus memberikan kepastian, termasuk bagaimana rumahnya, bagaimana intervensi perbankan ada di dalamnya, dan seterusnya," ucapnya.

Setelah semua proses selesai, Kemendagri kudu menjamin transisi administratif di IKN. Dia menilai, penataan administratif dan kependudukan perlu dilakukan dengan baik sejak awal. "Terutama tujuh kecamatan di dua kabupaten, PPU dan Kukar, itu harus bisa berjalan dengan smooth dan baik," tutumnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan, proses pemindahan ASN ke IKN akan difokuskan pada ASN muda yang memiliki kesiapan tinggi untuk beradaptasi di lingkungan kerja baru. ASN muda menjadi kunci dalam membangun kultur birokrasi baru di ibu kota negara masa depan. ■ PYB